

**ANALISIS PENERAPAN PROGRAM STOP WORK AUTHORITY  
(SWA) PADA PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN MEP  
(MECHANICAL, ELECTRICAL, DAN PLUMBING)  
(STUDI PROYEK APARTEMEN X PT. Y KOTA DEPOK)**

**Rizal Bahtiar, Baju Widjasena, Ida Wahyuni**

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan  
Masyarakat Universitas Diponegoro

Email : [rizalbachtiar05@gmail.com](mailto:rizalbachtiar05@gmail.com)

**Abstract:** *PT. Y is a construction service company that has a Stop Work Authority (SWA) policy as a form of prevention against work accidents. Based on preliminary survey findings data, there were four incidents of unsafe actions and unsafe conditions that were not given stop work intervention. This shows that there are problems in implementing the Stop Work Authority (SWA) policy. Therefore it is necessary to find the root of the problem so that further alternative solutions to problems can be found related to the implementation of the Stop Work Authority (SWA) policy. The purpose of this study is to describe and find in- depth information about the application of the Stop Work Authority (SWA) program in Architecture and MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing) work in the X Apartment Project PT. Y Depok City with qualitative methods. In this study the sample was selected using purposive sampling to obtain two main informants and seven triangulation informants. The instruments used in this study were in- depth interview guidelines and observation sheets. From the interviews it was found that the project personnel did not fully know the points of the Stop Work Authority (SWA) policy, there were still project personnel who had low expertise in stopping work interventions, project personnel had good motivation due to the encouragement factor from PT. Y and the same background, supervision is considered not optimal because it only focuses on violations of unsafe actions and unsafe conditions, and the use of SWA forms is only done by HSE staff. PT. Y still needs to optimize communication and oversight of the Stop Work Authority (SWA) policy and ensure that all personnel have the knowledge and expertise regarding the provision of stop work interventions.*

**Keywords :** the Stop Work Authority (SWA) policy, unsafe actions, unsafe conditions

**PENDAHULUAN**  
**Latar Belakang**

Dari keseluruhan jumlah kasus kecelakaan kerja di tahun 2015, 2016, dan 2017 sektor konstruksi

merupakan sektor dengan penyumbang kasus kecelakaan kerja terbanyak. Lebih dari 50 persen kasus kecelakaan kerja meninggal di tahun 2016 dan 2017 berasal dari sektor konstruksi.

Sektor konstruksi merupakan sektor utama perekonomian Indonesia yang menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi menurut Basis Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 sebanyak 4.844.689 orang menjadi 8.208.086 orang di tahun 2015 dengan kenaikan sekitar 7 % dari 114 juta orang pekerja.

PT. Y merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang pesat dan semakin meningkatnya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi, PT. Y berkomitmen untuk menerapkan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Penerapan upaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan melakukan beberapa program pencegahan dan pengendalian. Salah satu program dari departemen QSHE PT. Y adalah program Stop Work Authority (SWA). Peneliti telah melakukan survey pendahuluan di Proyek Apartemen X PT. Y dan ditemukan *unsafe action* dan *unsafe condition* dengan nilai risiko yang tinggi seperti pada pekerjaan arsitektur dan MEP

(*Mechanical, Electrical, dan Plumbing*). Temuan tersebut diantaranya, pekerja pengecoran bekerja di lantai 7 tidak menggunakan *body harness* saat berada dipinggiran tanpa railing, pekerja tidak mengaitkan *hook* saat bekerja diketinggian, pekerja tidak melapisi grinda dengan cover grinda, dan tempat bekerja terdapat kabel bertegangan tinggi yang tidak digantung dan tertimpa tumpukan kumkang. Saat menemukan kejadian tersebut, intervensi *Stop Work Authority* (SWA) tidak dilaksanakan dan tidak dilakukan perbaikan oleh pekerja lain dan mandor. Berdasarkan data temuan tersebut menunjukkan adanya permasalahan pelaksanaan program *Stop Work Authority* (SWA) dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis penerapan program *Stop Work Authority* (SWA) dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di Proyek Apartemen X PT. Y Kota Depok.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *purposive sampling*. Informan utama berjumlah dua orang yaitu staf HSE.

Informan triangulasi berjumlah tujuh orang dengan rincian satu *site manager* subkon, satu HSE subkon, satu supervisor subkon, satu mandor, dan tiga pekerja. Penelitian ini menganalisis variabel – variabel yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) di proyek apartemen x PT. Y yang meliputi kebijakan *Stop Work Authority* (SWA), pengetahuan, keahlian, motivasi, pengawasan, dan standar kerja / sarana. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen departemen QSHE PT. Y.

Data yang terkumpul dari hasil wawancara dan observasi diolah dengan tahapan penataan data, koding dan kategorisasi, pencarian pola dan penafsiran data. Data yang dihasilkan akan dideskripsikan dalam bentuk kata – kata dan bahasa serta disajikan apa adanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Menganalisis kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) di Proyek Apartemen X PT. Y Kota Depok

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama diketahui bahwa dua informan utama menyatakan telah ada kebijakan *Stop Work Authority* (SWA). Dapat diketahui bahwa PT. Y dalam mengeluarkan program K3 dalam hal ini adalah *Stop Work Authority* (SWA) telah terlebih dahulu menetapkan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 yang menyatakan tahapan SMK3 terdiri dari penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Penetapan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) menjadi dasar penerapan kebijakan oleh semua personil proyek. Berdasarkan *the construction industry's Leadership and Worker Engagement Forum* menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang keselamatan dan kesehatan. Komitmen manajemen puncak sangat penting demi tercapainya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Alur komunikasi dan informasi kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) dan HSE meeting perusahaan, paling dekat jika dikatakan bahwa komunikasi merupakan cara anggota – anggota dalam mnyampaikan dan/atau mendistribusikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan pihak manajemen kepada pekerja.

**B. Menganalisis pengetahuan personil tentang program *Stop Work Authority* (SWA) di Proyek Apartemen X PT. Y Kota Depok**

Dari hasil wawancara terkait pengetahuan personil tentang *Stop Work Authority* (SWA) dan diteliti bahwa pengetahuan personil proyek sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kebijakan *Stop Work Authority* dan penerapannya. Namun masih terdapat personil proyek yang masih belum mengetahui poin dari isi kebijakan. Didalam penelitian Seviana Reniawati menyebutkan bahwa pengetahuan tentang K3 dapat disebabkan karena faktor – faktor seperti kemampuan intelegensi seseorang yang akan mempengaruhi dalam mengolah informasi, P2K3 belum berjalan maksimal, informasi yang didapat informan berbeda – beda, dan sosialisasi belum berjalan maksimal

Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk niat dan perilaku seseorang. Ketika individu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) dan penerapannya, maka individu cenderung akan melaksanakan kebijakan tersebut dengan memberikan intervensi *stop work* secara langsung atau melaporkan tindakan tidak aman

atau kondisi tidak aman kepada personil yang dinilai berkompeten untuk memberikan intervensi *stop work*. Hal ini sejalan dengan penelitian Nuralmasdini Winnaputri mengenai pengetahuan yang baik tentang tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman sebagai suatu kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan, maka individu akan cenderung melaporkan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang mereka tahu .

**C. Menganalisis keahlian personil dalam melaksanakan program *Stop Work Authority* (SWA) di Proyek Apartemen X PT. Y Kota Depok**

Hasil wawancara mendalam dengan informan utama diketahui bahwa PT. Y sudah memberikan sosialisasi ke semua pihak proyek tentang adanya kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) dan memberikan pelatihan cara melakukan intervensi *stop work*. Hal ini didukung dengan pernyataan dari informan triangulasi yang menyatakan PT. Y telah memberikan sosialisasi terkait *stop work* dan memberikan contoh kasus cara menegur pekerja yang melakukan *unsafe action* dan *unsafe*

*condition*. Namun disisi lain masih terdapat informan yang menyatakan bahwa HSE kontraktor hanya memberikan himbuan untuk sesama pekerja harus saling mengingatkan. Dapat diketahui bahwa PT. Y belum secara maksimal menerapkan peraturan Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 yang menyatakan pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan. Pelatihan mempengaruhi terhadap pengetahuan penerapan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA). Hal ini sejalan dengan penelitian Putri Ayuni Alayyannur yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pelatihan K3 dan pengetahuan. Sehingga mempengaruhi keahlian personil dalam menerapkan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA).

Hasil wawancara mendalam informan utama diketahui bahwa dua informan menyatakan teknis melakukan intervensi *stop work* sesuai prosedur yaitu dengan menghentikan secara langsung ketika melihat suatu aktivitas tidak aman atau kondisi tidak aman.

Kemudian tidak melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dilakukan perbaikan dan merecord dengan mengisi form *stop work*. Jika bermaksud ingin melakukan intervensi *stop work* akan tetapi merasa tidak berkompeten, maka wajib menghubungi ke pelaksana atau tim HSE yang selalu berada di proyek dengan itu tim HSE akan segera menuju ke TKP. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, intervensi *stop work* pada pekerja yang melakukan tindakan tidak aman dan dalam kondisi tidak aman masih sering tidak dilaksanakan. Terutama pemberian intervensi oleh pekerja terhadap pekerja lainnya yang sering tidak dilakukan. Hal tersebut berdasarkan penjelasan informan terjadi karena faktor beda tim, beda mandor, dan beda perusahaan sub kontraktor. Selain itu pelaporan kejadian tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman dilaporkan oleh mandor, supervisor, HSE sub kontraktor. Hal ini berbeda dengan pekerja/tukang yang hanya membiarkan pelaku tindakan tidak aman. Hal ini terjadi karena pekerja merasa tidak enak terhadap temannya yang sama – sama pekerja dan adanya persepsi lain yang mendorong pekerja tidak

melapor ke personil yang dianggap berkompeten. Hal ini sejalan dengan penelitian Nuralmasdini Winnaputri yang menyatakan bahwa adanya persepsi dari pekerja lapangan terkait pelaporan tindakan tidak aman karena dapat membentuk budaya saling melaporkan dan mencari kesalahan orang lain dapat menyebabkan sikap yang kurang baik dalam melaporkan tindakan tidak aman<sup>28</sup>. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja yang akan terhambat.

#### **D. Menganalisis motivasi personil dalam melaksanakan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) di Proyek Apartemen X PT. Y Kota Depok**

Hasil wawancara mendalam dengan informan utama terkait motivasi personil dalam melakukan intervensi *stop work* diketahui bahwa dua informan utama menyatakan menyatakan tim HSE PT. Y telah memberikan motivasi kepada semua personil agar dapat memberikan intervensi *stop work* jika melihat tindakan tidak aman atau kondisi

tidak aman. Hal ini didukung dengan pernyataan dari informan triangulasi yang menyatakan bahwa tim HSE telah memberikan motivasi berupa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap keselamatan semua personil proyek, memberikan reward, dan memasang banner seruan *stop work*. Sehingga hal tersebut mendorong personil proyek untuk memberikan teguran dan mengingatkan ketika melihat rekannya melakukan tindakan tidak aman atau dalam kondisi tidak aman. Hal ini sejalan dengan penelitian M Fleming dan R Lardner yang menyatakan kesadaran dan kepemimpinan yang mendukung memiliki dampak motivasi keselamatan, yang pada gilirannya meningkatkan

kepedulian keselamatan<sup>33</sup>

Faktor lain yang mendorong personil proyek untuk memberikan intervensi *stop work* adalah adanya komitmen tertulis yang ditandatangani oleh mandor tentang kewajiban menghentikan pekerjaan yang dinilai terdapat tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman dan kepedulian terhadap sesama pekerja karena mempunyai latar belakang yang sama.

#### **E. Menganalisis pengawasan pelaksanaan kebijakan *Stop Work Authority (SWA)* di Proyek Apartemen X PT. Y Kota Depok**

Hasil wawancara mendalam dengan informan utama diketahui bahwa pengawasan pelaksanaan program kebijakan *Stop Work Authority (SWA)* adalah dengan melakukan HSE patrol oleh tim HSE bersama dengan pelaksana lapangan atau operasional. Kemudian forum *SHE Talk* menjadi forum untuk meninjau pelaksanaan *Stop Work Authority (SWA)*. Jika sesama rekan kerja lupa memperingatkan pelaku *unsafe action* dan tim HSE mengetahuinya maka tim HSE yang langsung akan memberikan intervensi *stop work*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan triangulasi yang menyatakan bahwa HSE kontraktor telah melakukan pengawasan rutin yaitu inspeksi dan *safety patrol*. Selain itu jika HSE kontraktor menemukan *unsafe action* atau *unsafe condition* maka HSE kontraktor secara tegas memberikan intervensi *stop work*. Namun pengawasan dapat dinilai belum optimal karena hanya terfokus pada

pelanggaran tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Pengawasan tidak terfokus pada personil yang melihat tindakan tidak aman dan kondisi tidak yang tidak memberikan intervensi *stop work*. Peran pengawasan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan perilaku pekerja<sup>34</sup>. Dalam penelitiannya, Lettyzia Juliaudrey Tampubolon mengungkapkan

bahwa pengawasan menjadi salah satu bentuk fungsi yang dapat mewujudkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja<sup>35</sup>. Sehingga pengawasan yang dilakukan secara rutin dan optimal akan mendorong penerapan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) oleh semua personil proyek.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian analisis penerapan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) pada pekerjaan arsitektur dan MEP (*Mechanical, Electrical, dan Plumbing*) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Y telah memiliki kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) yang dalam penetapan

Kebijakan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut dinilai sudah baik. Namun masih terdapat personil proyek yang belum mengetahui poin dari kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) secara lengkap.

2. Seluruh personil proyek memiliki pengetahuan yang cukup baik namun belum secara keseluruhan mengenai kebijakan *Stop Work Authority* (SWA). Masih terdapat poin dari kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) yang personil proyek belum mengetahuinya.
3. Seluruh personil proyek memiliki keahlian yang kurang baik dalam melakukan intervensi *stop work* karena PT. Y hanya memberikan sosialisasi berupa himbuan. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) belum dilaksanakan secara maksimal. Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut yaitu faktor beda tim, beda mandor, beda sub kontraktor, dan tidak melapor kepada personil yang dinilai berkompeten ketika pekerja tetap melanjutkan pekerjaannya



- setelah diberikan intervensi *stop work*
4. Seluruh personil proyek memiliki motivasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) karena PT. Y telah memberikan motivasi kepada seluruh personil proyek. Di sisi lain adanya motivasi yang tumbuh dalam diri personil proyek karena komitmen sub kontraktor / mandor dan latar belakang yang sama.
  5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan *Stop Work Authority* (SWA) oleh PT. Y dinilai belum optimal karena hanya terfokus pada pelanggaran tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Pengawasan tidak terfokus pada personil yang melihat tindakan tidak aman dan kondisi tidak yang tidak memberikan intervensi *stop work*.
- Ketenagakerjaan. Republik Indones. 2003;77.
3. Kementerian PU RI. Permenpu No 05/2014 Mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 2014;
  4. [Http://www.hse.gov.uk](http://www.hse.gov.uk). Managing occupational health. Available from:  
<http://www.hse.gov.uk/offshore/managinghealth.htm>
  5. PP RI No.50. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3. 2012;21(3):1–27. Available from: [https://jdih.kemnaker.go.id/data\\_wirata/2012-3-1.PDF](https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2012-3-1.PDF)
  6. Rachim MSA, Wahyuningsih AS, Wahyono B, Kerja K, Ilmu J, Masyarakat K. PENERAPAN PERATURAN DAN PROSEDUR K3 PT DELTA DUNIA SANDANG TEKSTIL. 2017;1(3):55–64.
  7. Hse.gov.uk. A Guide To Measuring Health & Safety. 2001;(December):1–30.
  8. Rinawati S, Widowati NN, Rosanti E. Pelaksanaan Pemakaian Alat Pelindung Diri Sebagai Upaya Pencapaian Zero Accident DI PT . X.

#### Daftar Pustaka

1. Ketenagakerjaan B. laporan tahunan BPJS tahun 2016. Lap Tah 2016. 2016;1–357.
2. Kementerian Sekretariat Negara RI. Undang-Undang

2016;1(1).

9. Winnaputri N, Denny HM, Ekawati. Studi Persepsi Dan Niat Pekerja Lapangan Dalam Melaporkan Kejadian Berbahaya Dan Kecelakaan Di Terminal Petikemas Semarang. 2017;5:281–9

10. Pengetahuan D, Rumah DI, Alayyannur PA. Korelasi Komitmen Manajemen Dan Pelatihan K3 Universitas Airlangga Correlation Of Management Commitment And K3 Training With Knowledge In Hospital " X " RS , maupun masyarakat di lingkungan RS berbagai pekerja kebersihan sebuah RS di Jakarta mengalami dermatitis kontak iritan kronis di tangan , prevalensi gangguan mental. 2018;2(2).

11. Forum the construction industry's L and WE. Leadership and worker involvement toolkit The SLAM technique. 2012;2.

12. Leadership T.

13. Kasyfan M, Koesyanto H. Higeia Journal Of Public Health. 2018;2(2):181–93.

14. Lardner MF& R. Strategies to promote safe behaviour as part of a health and safety management system. 2002;74.

15. Halimah S. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Aman Pekerja di PT SIM Plant Tambun II. 2010;

16. Tampubolon LJ. Efektivitas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai

Upaya Mewujudkan Budaya K3 Lettyzia Juliaudrey Tampubolon. 2015;3:34– 43.

the construction industry's Leadership and Worker Engager